



# The Nexus Between Digital Governance and Rural Community Participation: A Scopus-Based Bibliometric Review

(Keterkaitan antara Tata Kelola Digital dan Partisipasi Masyarakat Perdesaan: Tinjauan Bibliometrik Berbasis Scopus)

Adam Gamgulu <sup>1✉</sup> dan Rahmat Abd Fatah <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka, Ternate, Indonesia., Email: [adamgamgulu@gmail.com](mailto:adamgamgulu@gmail.com)

<sup>2</sup> Program Studi Sosiologi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Indonesia., Email: [rahmatabdafatah@gmail.com](mailto:rahmatabdafatah@gmail.com)

✉ Corresponding Author: Email: [adamgamgulu@gmail.com](mailto:adamgamgulu@gmail.com)

Info Artikel :	<input checked="" type="checkbox"/> Artikel Penelitian	<input type="checkbox"/> Artikel Pengabdian	<input type="checkbox"/> Riview Artikel
Diterima : 12 Okt 2025, Disetujui : 30 Nov 2025, Publikasi On-Line : 30 Nov. 2025			

## Abstract

This study examines the nexus between digital governance and rural community participation through a bibliometric approach based on Scopus-indexed publications from 2011 to 2026. The rapid advancement of digital technologies has transformed public governance systems, particularly in rural contexts where access, inclusion, and participation remain critical challenges. Using the PRISMA framework, 512 documents were initially identified and systematically filtered to obtain 30 highly relevant articles. The data were analyzed using VOSviewer to map the structure, trends, and evolution of research in this field. The findings reveal a significant increase in scholarly attention over the past decade, indicating a growing global interest in integrating digital governance with rural development. Network visualization identifies four major thematic clusters: (1) digital governance and rural development, (2) good governance and citizen participation, (3) technology and public service delivery, and (4) academic and methodological dimensions. Density and overlay analyses further demonstrate a shift from traditional e-government approaches toward more complex and integrated concepts such as smart governance, digital inclusion, and rural digitalization. The study highlights that digital governance is shaped by three interrelated dimensions: technological innovation, governance quality, and community participation. However, persistent challenges such as the digital divide, limited infrastructure, and low digital literacy hinder its effective implementation in rural areas. This research contributes to the literature by providing a comprehensive bibliometric mapping and theoretical synthesis of digital governance in rural contexts. It also offers policy insights for developing inclusive, participatory, and sustainable digital governance frameworks at the global level.

**Keywords:** Digital governance; Community participation; Rural areas; Bibliometric analysis; E-government

## I. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor publik telah menjadi fenomena global yang secara fundamental mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Konsep digital governance tidak lagi terbatas pada digitalisasi layanan administratif, tetapi berkembang menjadi

sistem tata kelola yang mengintegrasikan teknologi informasi, partisipasi warga, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik (Jayakumar & Prabakar, 2024; Liao et al., 2025; Robles-Gamboa & Hernández-Cenzano, 2025; Xu et al., 2025; M. Zhang & Huo, 2026). Dalam konteks perdesaan, digital governance memiliki peran strategis dalam

menjembatani kesenjangan pembangunan, memperluas akses layanan publik, serta memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam proses pemerintahan (Cheng et al., 2026). Di berbagai negara, terutama di kawasan Asia dan negara berkembang, penerapan e-government dan teknologi digital telah mendorong lahirnya model tata kelola yang lebih inklusif, meskipun masih dihadapkan pada tantangan struktural seperti kesenjangan digital (digital divide), keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya literasi teknologi masyarakat desa. Oleh karena itu, keterkaitan antara tata kelola digital dan partisipasi masyarakat perdesaan menjadi isu krusial dalam diskursus pembangunan kontemporer (Das, 2025; Paraušić et al., 2025).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digital governance berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan partisipasi warga. Studi awal menekankan bahwa e-government mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pemanfaatan teknologi informasi (Bo, 2025; D'Amato Castillo, 2025; Jia, 2024; Manoorkar & Yampe, 2025; Meng et al., 2025; Zhao et al., 2025; Zheng et al., 2025). Perkembangan selanjutnya mengarah pada konsep smart governance yang menekankan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat berbasis teknologi digital (Andrés Restrepo Guzmán et al., 2025; Fröhlich et al., 2023; Harshavarthan & Ayyanathan, 2025; Novianti & Syahid, 2026; Prasetyoningsih & Kusmayanti, 2025; Song et al., 2025; Yang et al., 2025). Penelitian di India dan China menunjukkan bahwa digitalisasi desa mampu meningkatkan efisiensi layanan serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan lokal, terutama melalui platform digital dan layanan berbasis internet. Sementara itu, studi di Indonesia menegaskan bahwa implementasi digital governance pada tingkat desa, seperti melalui program desa digital, mampu mendorong transparansi pengelolaan anggaran dan memperluas partisipasi masyarakat (Dhal & Singh, 2025; Ranjan et al., 2025; Reji et al., 2025; Salet & Parekh, 2023; Salwan & Bisht, 2023). Namun demikian, penelitian lain juga menemukan bahwa adopsi teknologi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan partisipasi, karena dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, literasi digital, serta kesiapan institusional (Bai & Yang, 2025; Duan & Dong, 2025; Kundu et al., 2025).

Meskipun literatur mengenai digital governance dan partisipasi masyarakat telah berkembang pesat, terdapat sejumlah kesenjangan penelitian. Pertama, sebagian besar

studi masih bersifat sektoral dan terfragmentasi, dengan fokus pada aspek teknologi atau kebijakan secara terpisah, sehingga belum memberikan gambaran holistik mengenai keterkaitan antara keduanya. Kedua, kajian yang secara khusus mengintegrasikan konteks perdesaan dengan pendekatan bibliometrik masih relatif terbatas, terutama yang memetakan struktur pengetahuan dan tren penelitian secara global. Ketiga, terdapat kurangnya sintesis sistematis yang mampu mengidentifikasi pola hubungan antar konsep kunci seperti service, efficiency, transparency, dan community participation, sebagaimana terlihat dalam visualisasi VOSviewer yang menunjukkan keterkaitan kuat antar variabel dengan total link strength sebesar 11.641. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun penelitian telah berkembang, pemahaman komprehensif mengenai dinamika dan evolusi bidang ini masih memerlukan pendekatan analisis yang lebih integratif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, studi ini menawarkan kebaruan (novelty) melalui pendekatan bibliometrik berbasis data Scopus yang dikombinasikan dengan analisis visual menggunakan VOSviewer. Kebaruan utama studi ini terletak pada upaya mengintegrasikan berbagai dimensi-teknologi digital, tata kelola, dan partisipasi masyarakat perdesaan-dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Selain itu, studi ini tidak hanya memetakan tren publikasi, tetapi juga mengidentifikasi kluster tematik utama, struktur jaringan pengetahuan, serta hubungan antar konsep kunci dalam literatur global. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperkuat pemahaman mengenai nexus antara digital governance dan partisipasi masyarakat, sekaligus kontribusi metodologis dalam penggunaan analisis bibliometrik untuk kajian pemerintahan dan pembangunan perdesaan.

## II. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan kerangka PRISMA (Rethlefsen et al., 2021; Sarkis-Onofre et al., 2021; Tugwell & Tovey, 2021) untuk memastikan proses seleksi literatur yang transparan, sistematis, dan dapat direplikasi. Data diperoleh dari database Scopus melalui query: TITLE-ABS-KEY ("digital governance" OR "e-government" OR "community participation" OR "rural") AND PUBYEAR > 2011 AND PUBYEAR < 2026, yang menghasilkan 512 dokumen awal. Proses seleksi dilakukan melalui empat tahap. Tahap identifikasi mencakup pengumpulan

seluruh dokumen tanpa seleksi awal. Tahap penyaringan (screening) dilakukan dengan menghapus duplikasi, membatasi jenis dokumen pada artikel jurnal, serta memilih artikel berbahasa Inggris dan relevan secara judul, sehingga tersisa 210 artikel. Tahap kelayakan (eligibility) melibatkan evaluasi mendalam terhadap abstrak dan isi berdasarkan kriteria relevansi substansi, konteks perdesaan, dan kontribusi ilmiah, sehingga diperoleh 75 artikel.

Tahap terakhir, inklusi (inclusion), dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas, kedalaman analisis, serta representasi tematik berdasarkan hasil VOSviewer. Hasil akhir menunjukkan 30 artikel yang paling relevan dan representatif untuk dianalisis, sehingga mampu memberikan sintesis ilmiah yang komprehensif mengenai keterkaitan antara tata kelola digital dan partisipasi masyarakat perdesaan.

Tabel PRISMA:

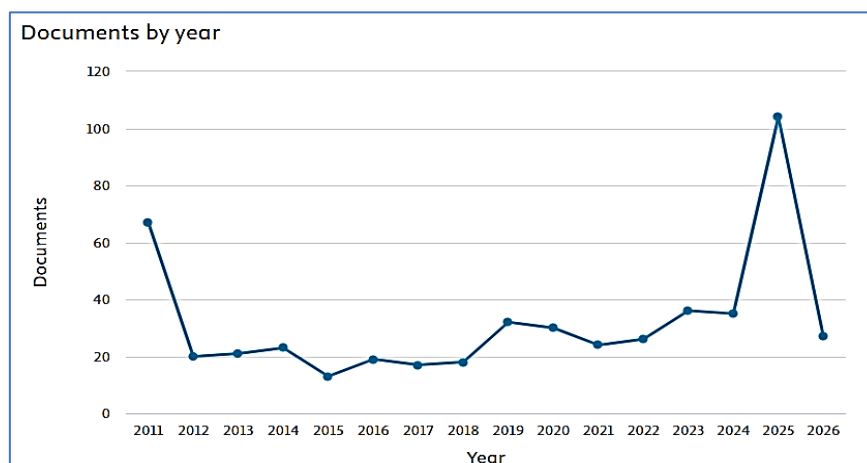
Tahapan PRISMA	Proses Seleksi	Kriteria	Jumlah Dokumen
Identifikasi	Pencarian di Scopus menggunakan query TITLE-ABS-KEY	Semua jenis dokumen (awal)	512
Penyaringan	Eliminasi duplikasi, seleksi jenis dokumen & bahasa, screening judul	Artikel jurnal, bahasa Inggris, relevansi awal	210
Kelayakan	Review abstrak dan isi artikel secara mendalam	Relevansi substansi, konteks rural, kontribusi teoritis/empiris	75
Inklusi	Seleksi akhir berdasarkan kualitas dan representasi tema	Artikel paling relevan dan representative	30

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Dinamika Perkembangan Publikasi Digital Governance dan Partisipasi Masyarakat Perdesaan

Transformasi digital dalam sektor publik telah mendorong lahirnya gelombang baru penelitian yang berfokus pada integrasi teknologi dengan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan analisis

terhadap 512 dokumen yang diindeks dalam Scopus, terlihat bahwa perkembangan publikasi mengenai digital governance dan partisipasi masyarakat perdesaan menunjukkan pola yang dinamis dan evolutif. Tren ini tidak hanya mencerminkan perkembangan teknologi, tetapi juga perubahan paradigma dalam tata kelola publik yang semakin partisipatif dan berbasis data.



Gambar 1. Dukumen berdasarkan Tahun (Sumber: Basis Data Scopus)

Pada fase awal (2011–2014), jumlah publikasi relatif rendah dan cenderung stabil. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut, kajian digital governance masih berada dalam tahap konseptualisasi awal. Literatur lebih banyak berfokus pada definisi e-government dan implementasi teknologi sebagai alat administratif (Bannister & Connolly, 2012; Heeks & Bailur,

2013) . Fokus utama pada periode ini adalah bagaimana teknologi dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dan akses informasi publik. Memasuki periode 2015–2019, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah publikasi. Hal ini beriringan dengan berkembangnya konsep smart governance yang mengintegrasikan teknologi, partisipasi

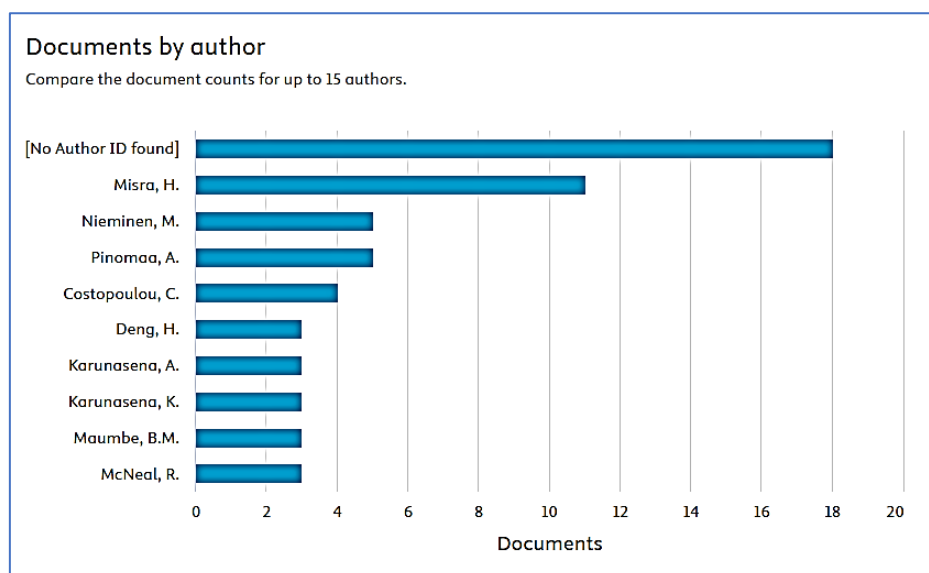
masyarakat, dan inovasi kebijakan (Ben Hassen & El Bilali, 2026; D' Amato Castillo, 2025; Ndlovu et al., 2023; Su, 2026) Selain itu, munculnya teknologi baru seperti big data, *artificial intelligence*, dan internet of things (IoT) turut memperluas ruang lingkup penelitian digital governance ("17th IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Participation, EPart 2025," 2026; Aikins & Dimitrijevska-Markoski, 2026; Li & Luo, 2024; Manoorkar & Yampe, 2025; Wang & Gao, 2025).

Lonjakan signifikan terlihat pada periode 2020-2025, dengan puncak publikasi pada tahun 2025. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari dampak pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi teknologi digital dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan. (Asimakopoulos et al., 2025; Gothankar et al., 2024; Mukminto et al., 2023) menegaskan bahwa pandemi menjadi katalis utama dalam transformasi digital sektor publik, termasuk dalam memperluas akses

layanan di wilayah perdesaan . Hal ini menunjukkan bahwa *digital governance* tidak lagi menjadi pilihan, tetapi kebutuhan strategis dalam menghadapi krisis global.

### Struktur Kontribusi Akademik: Penulis dan Jaringan Pengetahuan

Distribusi publikasi berdasarkan penulis menunjukkan bahwa bidang ini belum sepenuhnya terkonsolidasi dalam satu kelompok peneliti dominan (Gambar 2). Meskipun terdapat beberapa penulis dengan produktivitas tinggi, kontribusi penelitian masih tersebar luas. Hal ini menunjukkan bahwa kajian digital governance dan partisipasi masyarakat perdesaan bersifat terbuka dan multidisipliner. Fenomena ini memiliki dua implikasi penting. Pertama, adanya keberagaman perspektif dalam penelitian memungkinkan eksplorasi teori dan metode yang lebih luas.



**Gambar 2.** Dukumen berdasarkan Penulis (Sumber: Basis Data Scopus)

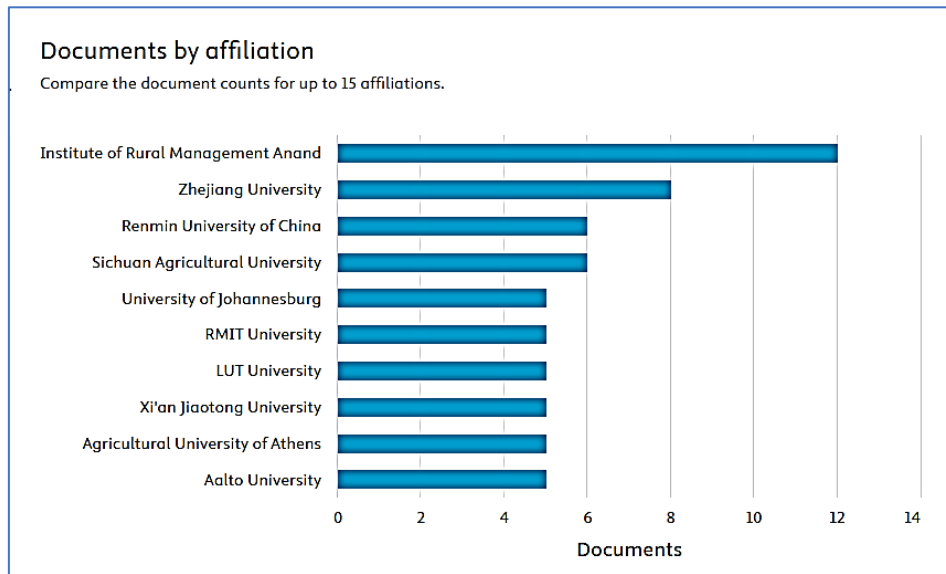
Kedua, belum adanya dominasi epistemik menunjukkan bahwa bidang ini masih dalam tahap perkembangan dan belum mencapai kematangan teoritis. Dalam konteks ini, penelitian bibliometrik menjadi penting untuk memetakan struktur pengetahuan dan mengidentifikasi aktor-aktor kunci dalam bidang ini.

### Pusat Produksi Pengetahuan: Analisis Afiliasi Institusi

Analisis afiliasi menunjukkan bahwa institusi pendidikan tinggi di Asia, khususnya China dan India, mendominasi produksi penelitian dalam bidang ini (Gambar 3). Hal ini

mencerminkan bahwa negara berkembang menjadi pusat eksperimen dalam implementasi digital governance, terutama dalam konteks perdesaan. Dominasi China dapat dikaitkan dengan kebijakan nasional seperti Digital China dan Rural Revitalization Strategy, yang mendorong integrasi teknologi dalam pembangunan desa. Sementara itu, India melalui program Digital India juga mengembangkan infrastruktur digital di wilayah perdesaan. Hal ini sejalan dengan temuan (Kalokar et al., 2026; Nair & Mishra, 2025; Sihotang et al., 2023) yang menyatakan bahwa negara berkembang memiliki kebutuhan yang lebih mendesak untuk mengadopsi digital

governance guna meningkatkan efisiensi layanan publik dan mengatasi ketimpangan pembangunan.

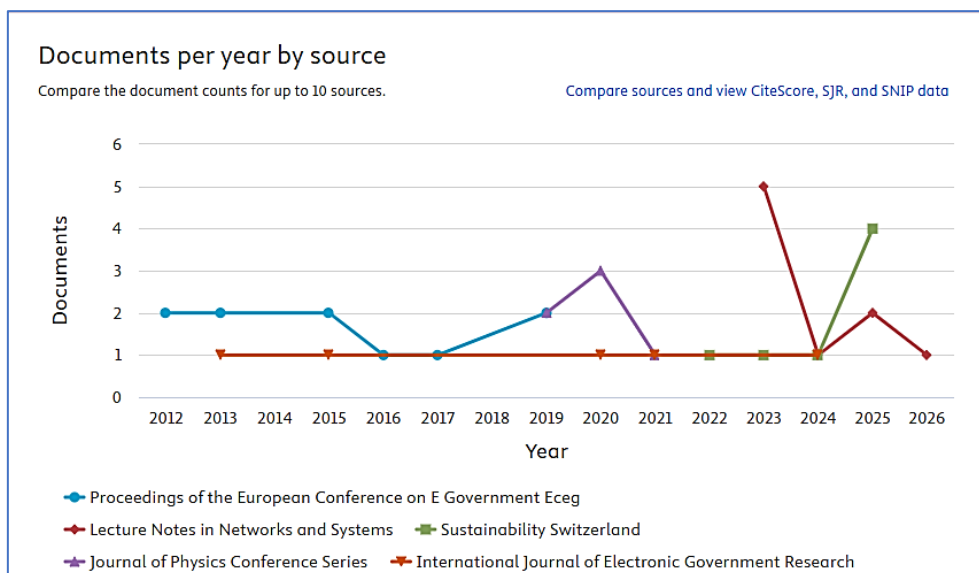


Gambar 3. Dokumen berdasarkan Afiliasi (Sumber: Basis Data Scopus)

**Ekosistem Publikasi: Sumber Jurnal dan Diseminasi Ilmiah**

Distribusi sumber publikasi menunjukkan bahwa penelitian tersebar pada berbagai jurnal dan prosiding, dengan dominasi pada jurnal yang berfokus pada teknologi informasi dan administrasi public (Gambar 4). Hal ini menunjukkan bahwa digital governance merupakan bidang yang bersifat lintas disiplin.

Jurnal seperti Government Information Quarterly memainkan peran penting sebagai platform utama dalam diseminasi penelitian digital governance (Levesque et al., 2024). Selain itu, kehadiran prosiding konferensi menunjukkan bahwa bidang ini masih berkembang dan banyak penelitian awal dipresentasikan dalam forum akademik sebelum dipublikasikan secara formal.



Gambar 4. Dokumen berdasarkan tahun dan sumber (Sumber: Basis Data Scopus)

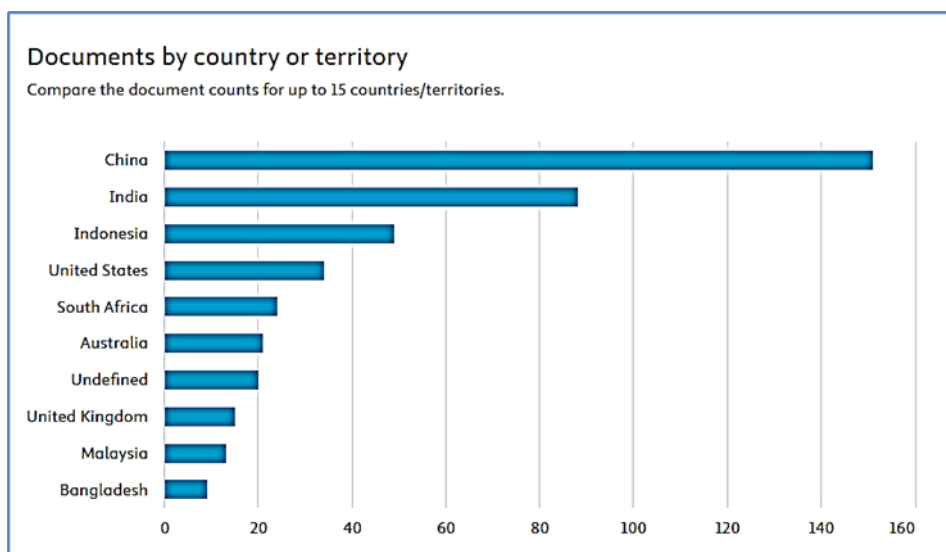
**Distribusi Geografis: Perspektif Global dan Konteks Lokal**

Analisis geografis menunjukkan bahwa China, India, dan Indonesia merupakan negara

dengan kontribusi publikasi tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa isu digital governance dan partisipasi masyarakat perdesaan memiliki relevansi yang tinggi di negara berkembang.

Konteks perdesaan di negara berkembang seringkali menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan keterbatasan sumber daya. Oleh

karena itu, digital governance menjadi solusi strategis untuk meningkatkan akses layanan publik dan memperkuat partisipasi masyarakat.

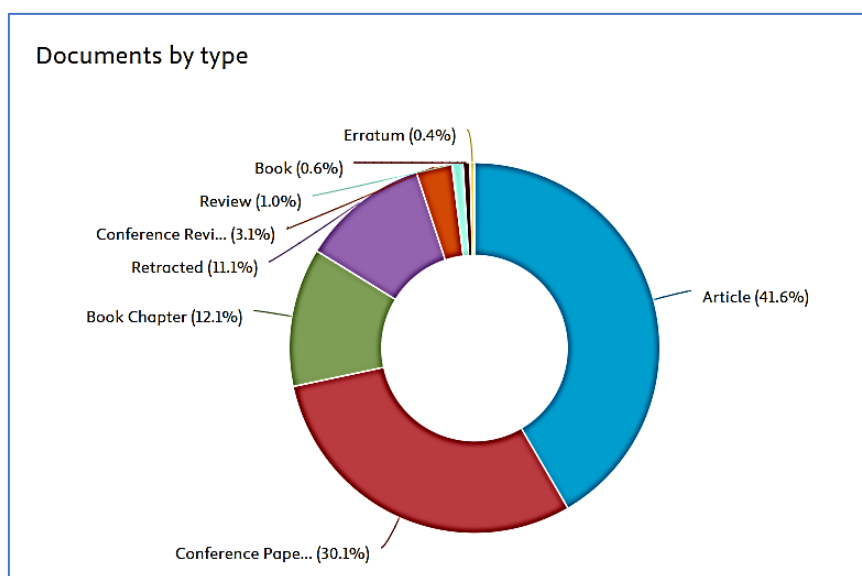


Gambar 5. Dokumen berdasarkan Negara (Sumber: Basis Data Scopus)

**Karakteristik Dokumen dan Evolusi Penelitian**

Distribusi jenis dokumen menunjukkan dominasi artikel jurnal (41,6%) dan conference paper (30,1%) (Gambar 6). Hal ini menunjukkan

bahwa bidang ini masih dalam tahap berkembang, dengan banyak penelitian awal dipresentasikan dalam konferensi sebelum dipublikasikan secara penuh.



Gambar 6. Dokumen berdasarkan Jenis (Sumber: Basis Data Scopus)

**Analisis Cluster VOSviewer**

Analisis jaringan menggunakan VOSviewer mengungkapkan bahwa struktur pengetahuan dalam kajian digital governance dan partisipasi masyarakat perdesaan tidak bersifat linier, melainkan terbentuk dalam konfigurasi empat klaster utama yang saling terhubung secara intensif. Dengan total link strength yang tinggi, jaringan ini menunjukkan bahwa perkembangan

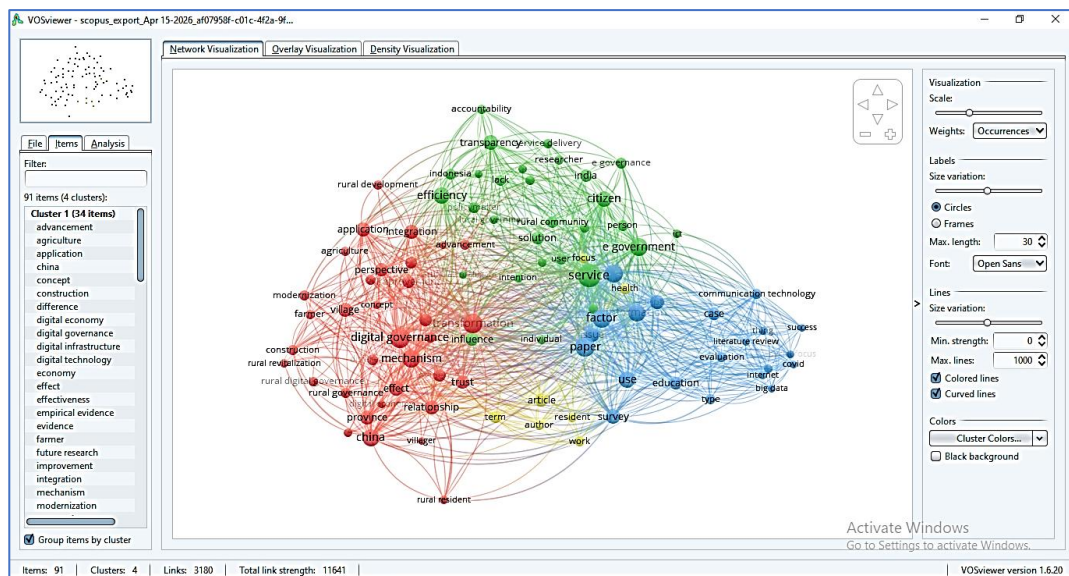
literatur tidak terfragmentasi, tetapi bergerak dalam pola integratif yang menghubungkan teknologi, tata kelola, dan masyarakat (Gambar 7).

**Cluster 1: Digital Governance dan Pembangunan Perdesaan**

Klaster pertama merepresentasikan dimensi struktural dan pembangunan yang berfokus pada integrasi teknologi digital dalam

konteks perdesaan. Kata kunci dominan seperti *digital governance*, *village*, *agriculture*, *farmer*, *rural revitalization*, dan *digital technology* menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya diposisikan sebagai alat administratif, tetapi sebagai instrumen transformasi sosial-ekonomi desa. Dalam perspektif teoritis, klaster ini mencerminkan pendekatan *developmental governance*, di mana negara dan institusi publik menggunakan teknologi untuk mendorong

pembangunan berbasis wilayah. Studi di China, misalnya, menunjukkan bahwa digitalisasi desa mampu meningkatkan efisiensi produksi pertanian, memperluas akses pasar, serta mengurangi kesenjangan antara wilayah urban dan rural (X. Chen et al., 2025; B. Zhang et al., 2025; M. Zhang & Huo, 2026; R. Zhang & Zhao, 2025; Zheng et al., 2025).



Gambar 7. Analisis Jaringan dan kluster

Namun demikian, temuan dalam klaster ini juga mengindikasikan adanya paradoks. Di satu sisi, teknologi membuka peluang pemberdayaan masyarakat desa, di sisi lain, ketergantungan pada infrastruktur digital berpotensi memperdalam kesenjangan jika tidak diimbangi dengan kebijakan inklusif. Hal ini menegaskan bahwa digital governance dalam konteks perdesaan tidak dapat dilepaskan dari isu keadilan sosial dan distribusi sumber daya.

**Cluster 2: Good Governance dan Partisipasi Warga**

Klaster kedua berfokus pada dimensi normatif tata kelola, dengan kata kunci seperti *transparency*, *accountability*, *citizen*, *efficiency*, dan *trust*. Klaster ini menunjukkan bahwa digital governance tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga dengan prinsip-prinsip *good governance* yang menjadi fondasi legitimasi pemerintahan. Dalam literatur klasik, *e-government* dipandang sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Ferdous, 2025; Lin & Zeng, 2025; Olarinde et al., 2026; Paraušić et al., 2025; Pontones-Rosa et al., 2023; Sihotang et al., 2023;

Yusuf et al., 2023). Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa teknologi juga berfungsi sebagai medium untuk memperluas partisipasi masyarakat melalui platform digital (*e-participation*) (Ayebare & Sam, 2025; Pontones-Rosa et al., 2023; Tissayakorn, 2025) menegaskan bahwa partisipasi digital tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Yang menarik, dalam jaringan VOSviewer, klaster ini memiliki konektivitas tinggi dengan klaster teknologi dan pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bukanlah variabel independen, melainkan bagian integral dari ekosistem *digital governance*. Dengan kata lain, keberhasilan digital governance sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk membangun hubungan interaktif dengan warga.

**Cluster 3: Teknologi dan Pelayanan Publik**

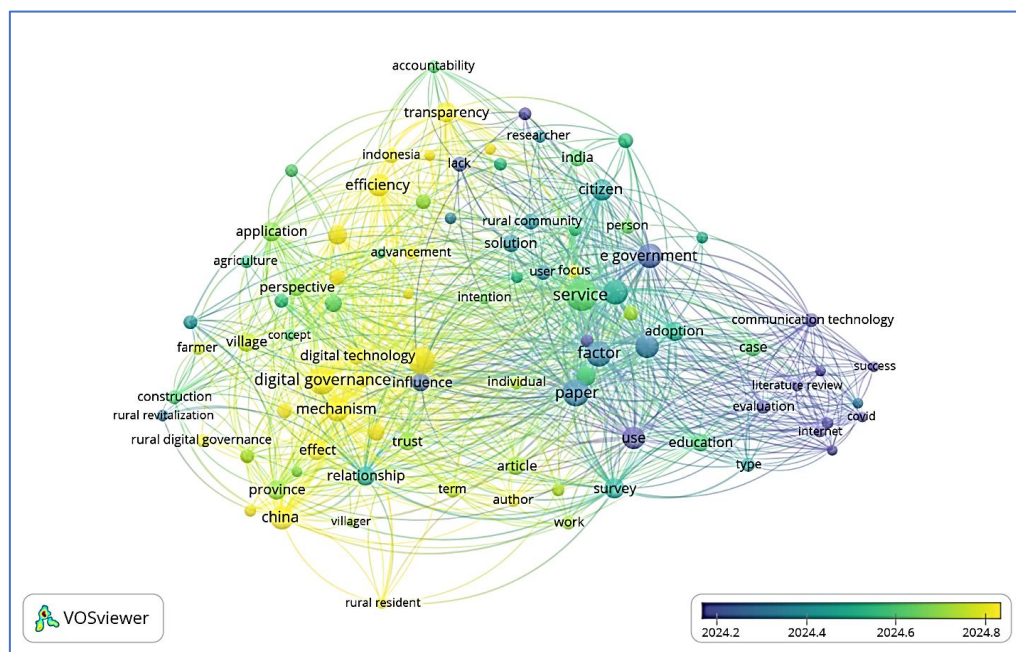
Klaster ketiga merepresentasikan dimensi operasional digital governance, dengan fokus pada penggunaan teknologi dalam pelayanan publik. Kata kunci seperti *service*, *use*, *adoption*, *internet*, *communication technology*, dan *evaluation*



### Evolusi Penelitian (*Analisis Overlay*)

Analisis overlay menunjukkan perkembangan temporal penelitian dengan menggunakan gradasi warna. Warna biru

menunjukkan topik lama, sedangkan warna kuning menunjukkan topik terbaru.



Gambar 9. Evolusi penelitian (Sumber: VOSviewer)

Temuan menunjukkan bahwa penelitian awal berfokus pada e-government dan digitalisasi layanan dasar. Namun, penelitian terbaru mulai bergeser ke arah konsep yang lebih kompleks seperti smart governance, digital technology, dan rural digitalization (Gambar 9). Perubahan ini mencerminkan evolusi paradigma dari pendekatan administratif menuju pendekatan sistemik yang mengintegrasikan teknologi, data, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, digital governance tidak lagi dipahami sebagai alat, tetapi sebagai ekosistem yang melibatkan berbagai aktor dan teknologi.

### Sintesis Teori

Digital governance berkembang sebagai sistem multidimensional yang bertumpu pada tiga pilar utama: teknologi, tata kelola, dan partisipasi masyarakat. Teknologi berfungsi sebagai pendorong efisiensi dan inovasi layanan publik, sementara tata kelola memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Di sisi lain, partisipasi masyarakat menjadi indikator kunci keberhasilan, khususnya dalam konteks perdesaan. Ketiga dimensi ini saling terhubung dan membentuk ekosistem yang utuh, sehingga keberhasilan digital governance bergantung pada integrasi yang seimbang di antara ketiganya.

### IV. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara digital governance dan partisipasi masyarakat perdesaan berkembang secara dinamis dan integratif dalam literatur global. Analisis bibliometrik mengidentifikasi empat kluster utama yang saling terhubung, mencerminkan integrasi antara teknologi, tata kelola, dan masyarakat. Perkembangan penelitian juga menunjukkan pergeseran dari e-government administratif menuju digital governance yang lebih sistemik, dengan fokus pada smart governance, inklusi digital, dan transformasi perdesaan. Secara teoretis, digital governance dibangun atas tiga dimensi utama: teknologi sebagai enabler, tata kelola sebagai fondasi normatif, dan partisipasi masyarakat sebagai indikator keberhasilan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan digital, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya literasi teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan integratif yang menggabungkan penguatan teknologi, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, pengurangan digital divide, penguatan regulasi, kolaborasi global, serta peningkatan literasi digital menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola digital yang inklusif dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- 17th IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Participation, ePart 2025. (2026). Lecture Notes in Computer Science, 15978 LNCS. <https://www.scopus.com/pages/publications/105014499544?origin=resultlist>
- Aikins, S. K., & Dimitrijevska-Markoski, T. (2026). Determinants of government AI adoption for e-government. *AI and Society*. <https://doi.org/10.1007/s00146-025-02849-y>
- Andrés Restrepo Guzmán, J., Alonso Pantoja Ospina, M., López Trujillo, M., & Arturo González Cuervo, C. (2025). Transition to Smart Government in Colombia: A Bibliometric Analysis of Trends, Gaps, and Opportunities. *Proceedings of the LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education and Technology, 2025*. <https://doi.org/10.18687/LACCEI2025.1.1.2369>
- Asimakopoulou, G., Antonopoulou, H., Giannoukou, I., Golfi, A., Sataraki, I., & Halkiopoulou, C. (2025). Virtual Collaboration and E-Democracy During the Pandemic Era: Insights on Digital Engagement, Infrastructure, and Social Dynamics. *Information (Switzerland)*, 16(6). <https://doi.org/10.3390/info16060492>
- Ayebare, J., & Sam, S. (2025). A Multi-Dimensional E-Participation Model to Boost Public Confidence in Democracy in Rural Uganda: Participatory Approach. *International Conference on EDemocracy and EGovernment, ICEDEG, 2025*, 255–264. <https://doi.org/10.1109/ICEDEG65568.2025.11081648>
- Bai, X., & Yang, L. (2025). Digital literacy's impact on digital village participation in rural left-behind women through serial mediation of political trust and self-efficacy. *Scientific Reports*, 15(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-16093-3>
- Ben Hassen, T., & El Bilali, H. (2026). Digital technologies for sustainable agriculture and food systems: Introduction. In *Digital Technologies for Sustainable Agriculture and Food Systems* (pp. 1–10). <https://doi.org/10.1016/B978-0-443-33508-2.00004-9>
- Bo, D. (2025). Digital Context: Social Foundation and Technological Adaptation of Digital Rural Governance. *Contemporary Social Sciences*, 10(6), 116–134. <https://doi.org/10.19873/j.cnki.2096-0212.2025.06.008>
- Budai, B. B., Bozsó, G. T., Csuha, S. T., & Tózsai, I. (2025). Digital competences: Weak links in the ramp-up of digital public services. In *Digital Competency Development for Public Officials: Adapting New Technologies in Public Services* (pp. 75–94). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-6547-2.ch004>
- Caplanova, A., & Szakadatova, E. (2025). Digitalisation of the public sector in Thailand – Insights into Thailand's public sector digitalisation strategy. *Open Research Europe*, 5. <https://doi.org/10.12688/openreseurope.19868.2>
- Chen, X., Cheng, X., Zhang, T., & Guo, H. (2025). How do information and communication technology platforms shape rural e-governance: The case of Zhao-lou Village on the WeCounty platform. *Information Systems Journal*, 35(2), 545–576. <https://doi.org/10.1111/isj.12551>
- Chen, Y., Lei, Z., Li, H., Zhang, Y., & Zhang, W. (2025). Digital Tools for Enhancing Rural Government Efficiency: A Case Study with a Focus on Older Adults. *Proceedings of Chinese CHI 2024 - 12th International Symposium of Chinese CHI, Chinese CHI 2024*, 682–687. <https://doi.org/10.1145/3758871.3758934>
- Cheng, J., Zheng, S., Ng'ombe, J. N., & Cheng, H. (2026). Can Digital Village Construction Boost Rural Households' Risky Financial Assets Selection? Evidence from Rural China. *Agriculture (Switzerland)*, 16(4). <https://doi.org/10.3390/agriculture16040491>
- D' Amato Castillo, G. (2025). Digital governance in colombian education: between technological innovation and the concentration of power. *Izquierdas*, 2025(54). <https://www.scopus.com/pages/publications/105028904885?origin=resultlist>
- Das, S. (2025). Bridging Digital Divide: A Study on the UMANG Platform and Its Impact on E-Governance. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 1442 LNNS, 337–344. [https://doi.org/10.1007/978-981-96-6929-5\\_27](https://doi.org/10.1007/978-981-96-6929-5_27)
- Dhal, S., & Singh, N. (2025). E-Governance in India:

- Heralding A New Era of Inclusive Governance. In *E-Governance in India: Heraldng a New Era of Inclusive Governance*.  
<https://doi.org/10.4324/9781003561842>
- Díaz Calderón, R. R., Pérez Vargas, C. G. A., Torres Serna, H. A., & Pérez, G. H. (2025). DIGITAL TRANSFORMATION IN PUBLIC RECORDS MANAGEMENT. *Public Administration Issues*, 2025(6), 79–96.  
<https://doi.org/10.17323/1999-5431-2025-0-6-79-96>
- Doan, U. T. T., Chu, H. M., & Vu, T. V. (2026). Digital Transformation Influencing Civil Administrative Services at Grassroots Governance and Social Development. *Law and Development Review*, 19(1), 155–180.  
<https://doi.org/10.1515/ldr-2025-0009>
- Duan, Y., & Dong, X. (2025). Does Digital Literacy Matter for E-Government Usage Behavior? An Empirical Analysis Based on Data from Rural Women in China. *SAGE Open*, 15(3).  
<https://doi.org/10.1177/21582440251376118>
- Ferdous, J. (2025). E-Government in Bangladesh: Governance and Public Service Delivery. In *E-Government in Bangladesh: Governance and Public Service Delivery*.  
<https://doi.org/10.4324/9781003631699>
- Fröhlich, K. A., Soe, R.-M., Maoneke, P. B., Jain, K., Pinomaa, A., & Nieminen, M. (2023). Extending the “Smart City” Concept to Small-to-Medium Sized Estonian Municipalities: Initiatives and Challenges Faced. *Lecture Notes in Business Information Processing*, 464 LNBIP, 264–276. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-30694-5\\_20](https://doi.org/10.1007/978-3-031-30694-5_20)
- Gothankar, J. S., Bargaje, M. D., Patil, S. V., & Doke, P. P. (2024). Screening and diagnosis of COPD and asthma based on government guidelines empowering peripheral health workers in Pune district Maharashtra, India: A study protocol. *PLoS ONE*, 19(9 September).  
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0308210>
- Harshavarthan, E., & Ayyanathan, N. (2025). Smart Village Panchayat-An e-Governance system. *Proceedings of 5th International Conference on Soft Computing for Security Applications, ICSCSA 2025*, 360–366.  
<https://doi.org/10.1109/ICSCSA66339.2025.11170835>
- Ishola, A. A., Maramura, T. C., & Gumbo, T. (2025). Charting digital governance: a bibliometric analysis of information and communication technology research in Nigeria’s public administration using Scopus. *Frontiers in Sustainable Cities*, 7.  
<https://doi.org/10.3389/frsc.2025.1605736>
- Jayakumar, B., & Prabakar, S. (2024). Leveraging Digital Innovation to Enhance MGNREGA’s Impact on Rural Empowerment. *International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering*, 11(1), 1270–1277.  
<https://doi.org/10.22399/ijcesen.1050>
- Jia, H. (2024). Government Digital Transformation and the utilization of Basic Public Health Services by China’s migrant population. *BMC Public Health*, 24(1).  
<https://doi.org/10.1186/s12889-024-20730-3>
- Kalokar, S., Sule, R., & Mirkute, D. (2026). Role of ICT in E-Governance Problems and Acceptability. *Smart Innovation, Systems and Technologies*, 468 SIST, 476–483.  
[https://doi.org/10.1007/978-3-032-12999-4\\_42](https://doi.org/10.1007/978-3-032-12999-4_42)
- Kundu, A., Bej, T., & Mondal, R. (2025). Exploring teachers’ AI literacy: cognitive, pedagogical, ethical, and contextual insights from Indian schools. *Teaching Education*.  
<https://doi.org/10.1080/10476210.2025.2570227>
- Lamba, Y., & Srinivasan, S. (2025). Digital Strategies to Help the Elderly Access Government Services. In *Startup-Driven E-Government: Digital Innovation for Sustainable Ecosystems* (pp. 273–306).  
<https://doi.org/10.4018/979-8-3373-0817-3.ch0011>
- Levesque, V. R., Bell, K. P., & Johnson, E. S. (2024). The role of municipal digital services in advancing rural resilience. *Government Information Quarterly*, 41(1).  
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101883>
- Li, G., & Luo, Z. (2024). Construction of a Rural Digital Governance Platform Based on Artificial Intelligence Technology. *Lecture Notes in Electrical Engineering*, 1214 LNEE, 245–254. [https://doi.org/10.1007/978-981-97-4193-9\\_26](https://doi.org/10.1007/978-981-97-4193-9_26)
- Liao, F., Zheng, Y., & Yang, D. (2025). Digital transformation in rural governance: unraveling the micro-mechanisms and the role of government subsidies. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1).  
<https://doi.org/10.1057/s41599-025->

- 05716-9  
Lin, X., & Zeng, R. (2025). Trust in E-government as a Tool to Shape Political Trust Between Urban and Rural Residents: An Empirical Study Based on Trust Theories. *SAGE Open*, 15(3).  
<https://doi.org/10.1177/21582440251382154>
- Liu, S., & Yuan, J. (2025). Can government digitalization promote the urban-rural equalization of basic public services? Evidence from double machine learning. *Applied Economics*, 57(34), 5065–5080.  
<https://doi.org/10.1080/00036846.2024.2364113>
- Manoorkar, J., & Yampe, P. (2025). Building a Digital State: Strategic Role of Information Technology in Advancing E-Government Services. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 1319 LNNS, 287–297.  
[https://doi.org/10.1007/978-981-96-4145-1\\_22](https://doi.org/10.1007/978-981-96-4145-1_22)
- Meng, M.-M., Fan, S.-Y., & Lei, J.-S. (2025). Digital good governance: Rural entrepreneurs' digital literacy and corporate technology for social good. *Studies in Science of Science*, 43(7), 1546–1554.  
<https://www.scopus.com/pages/publications/105014737907?origin=resultslist>
- Mukminto, E., Martitah, M., Damayanti, R., & Wedhatami, B. (2023). Public Services Versus Covid-19: Participation of Villagers in Public Service based on E-Government in Pandemic. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 6(1), 1–16.  
<https://doi.org/10.15294/jphi.v6i1.60650>
- Nair, J. K., & Mishra, P. (2025). Demand side financing for promoting institutional delivery: experiences of Janani Suraksha Yojana in Indian states. *International Journal of Health Economics and Management*, 25(2), 245–270.  
<https://doi.org/10.1007/s10754-025-09391-w>
- Ndlovu, N., Ochara, N. M., & Martin, R. (2023). Influence of digital government innovation on transformational government in resource-constrained contexts. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 14(5), 960–981.  
<https://doi.org/10.1108/JSTPM-11-2021-0173>
- Novianti, K., & Syahid, C. N. (2026). Toward Inclusive Smart Cities: Insights from Surabaya, Indonesia, and Taipei, Taiwan. In *Global Cities in Indonesia: Advancing Inclusive Social Development Towards Societal Progress* (pp. 269–288).  
[https://doi.org/10.1007/978-981-95-4530-8\\_13](https://doi.org/10.1007/978-981-95-4530-8_13)
- Olarinde, E. S., Idem, U. J., Anwana, E., Netswera, F. G., & Fagbadebo, O. (2026). E-GOVERNMENT AND DIGITAL HEALTH SYSTEMS FOR SUSTAINABLE HEALTHCARE DELIVERY IN NIGERIA. *Journal of Sustainable Development Law and Policy*, 17(2), 445–462.  
<https://doi.org/10.4314/jsdlp.v17i2.20>
- Paraušić, V., Kljajić, N., & Bekić Šarić, B. (2025). E-government in agriculture: assessment of Serbian farmers' ability to use the digital platform eAgrar. *Journal of Central European Agriculture*, 26(2), 528–541.  
<https://doi.org/10.5513/JCEA01/26.2.4668>
- Pontones-Rosa, C., Perez-Morote, R., Nunez-Chicharro, M., & Alonso-Carrillo, I. (2023). E-government in Depopulated Rural Areas. An Approach to the Reality of Spanish Municipalities. *Population Research and Policy Review*, 42(4).  
<https://doi.org/10.1007/s11113-023-09808-9>
- Prasetyoningsih, N., & Kusmayanti, H. (2025). Green Constitution in the Digital Age: Bridging Traditional Wisdom and Smart Environmental Policy. *E3S Web of Conferences*, 660.  
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202566002001>
- Ranjan, R., Singh, R., & Tripathi, S. (2025). The Role of Green Information Systems in India's Environmental Sustainability: A Review-Based Perspective. *Communications in Computer and Information Science*, 2651 CCIS, 418–434.  
[https://doi.org/10.1007/978-3-032-04225-5\\_26](https://doi.org/10.1007/978-3-032-04225-5_26)
- Reji, S. K., Moulya, B., & Rajeswari, P. S. (2025). E-governance evolution: India's digital leap from files to cloud. *Journal of Information Technology Teaching Cases*.  
<https://doi.org/10.1177/20438869251334257>
- Rethlefsen, M. L., Kirtley, S., Waffenschmidt, S., Ayala, A. P., Moher, D., Page, M. J., & Koffel, J. B. (2021). PRISMA-S: an extension to the PRISMA statement for reporting literature searches in systematic reviews. *Systematic Reviews*, 10(1), 39.
- Robles-Gamboa, C., & Hernández-Cenzano, C. G. (2025). Bridging the Digital Divide: A

- Comparative Policy Framework for Web Accessibility in Peru and Reference Nations. *C3 2025 - IEEE Colombian Caribbean Conference*.  
<https://doi.org/10.1109/C366505.2025.11340157>
- Salet, J. K., & Parekh, B. (2023). Implementation of E-Governance Framework for Rural Areas of India. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 628 LNNS, 341–352.  
[https://doi.org/10.1007/978-981-19-9888-1\\_26](https://doi.org/10.1007/978-981-19-9888-1_26)
- Salwan, P., & Bisht, B. S. (2023). Digital Governance: Government of India Initiatives in the Public Sector. In *Administration in India: Challenges and Innovations* (pp. 214–234).  
<https://doi.org/10.4324/9781003433187-18>
- Sarkis-Onofre, R., Catalá-López, F., Aromataris, E., & Lockwood, C. (2021). How to properly use the PRISMA Statement. *Systematic Reviews*, 10(1), 117.  
<https://doi.org/10.1186/s13643-021-01671-z>
- Sihotang, D. M., Hidayanto, A. N., Purwandari, B., Wijoyono, E., Diana, E., & Putra, R. R. (2023). Factors Affecting E-government Adoption at the Micro Level of Government in Developing Countries: A Systematic Literature Review. *7th International Conference on Business and Information Management, ICBIM 2023*, 26–30.  
<https://doi.org/10.1109/ICBIM59872.2023.10303127>
- Song, H., Chen, J., Wu, M., & Zeng, W. (2025). Collaborative Governance Model for Fitness-Health Integration in Smart Communities: Framework and Outcome Measurement. *Systems*, 13(9).  
<https://doi.org/10.3390/systems13090755>
- Su, M. (2026). Governing Digital Transformation: When States Centralize and Localities Innovate (Virginia and Florida, 2000–2025). *State and Local Government Review*.  
<https://doi.org/10.1177/0160323X251409818>
- Tissayakorn, K. (2025). Comparative analysis of E-government development status of ASEAN member states: Accomplishments and challenges. *Sustainable Futures*, 10.  
<https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.101353>
- Tugwell, P., & Tovey, D. (2021). Prisma 2020. In *Journal of Clinical Epidemiology* (Vol. 134, pp. A5–A6). Elsevier.  
<https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2021.04.008>
- Wang, X., & Gao, Y. (2025). Digital Intelligence Empowerment in Traditional Village Renewal: A Case Study of Human Settlement Environmental Governance in the Ancient Villages of Xishan Island, Suzhou, Jiangsu, China. *Journal of Resources and Ecology*, 16(6), 1731–1738.  
<https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2025.06.011>
- Xu, X., Li, Q., Liao, Z., & Yu, X. (2025). Risk Governance of Centralized Farmers' Residence Policy in Rural-Urban Integration: A Case Study of Shanghai L Town. *Land*, 14(9).  
<https://doi.org/10.3390/land14091906>
- Yang, X., Hu, W., & Deng, Y. (2025). Smart community governance experience and resident wellbeing: The mediating role of community participation and moderating effect of reality-expectation gap. *Acta Psychologica*, 259.  
<https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.105319>
- Yusuf, M., Sophan, M. K., Darmawan, A. K., Satoto, B. D., Muntasa, A., & Nugroho, R. A. (2023). E-Government Service Management System (E-GovService) to Improve Local e-Government Using DevOps Approach. *2023 6th International Conference on Information and Communications Technology, ICOIACT 2023*, 309–314.  
<https://doi.org/10.1109/ICOIACT59844.2023.10455931>
- Zhang, B., Xiong, W., Yin, J., Zhang, P., & Liu, B. (2025). How to Form the Rural Digital Governance Platform—Under the Framework of Mixed-Scanning—Multiple Streams—Based on an Empirical Investigation of the Platform of “JuHaoban” in Julu County, Hebei Province. *Sustainability* (Switzerland), 17(6).  
<https://doi.org/10.3390/su17062517>
- Zhang, M., & Huo, Z. (2026). Digital Governance in Rural China and Social Participation Deprivation Among Rural Households: The Mediating Role of Public Service Access and the Moderating Effect of Digital Exclusion. *Systems*, 14(1).  
<https://doi.org/10.3390/systems14010096>
- Zhang, R., & Zhao, D. (2025). The Impact of Digital Infrastructure on the Urban–Rural Income Gap: Empirical Evidence from 285 Cities in

China. Sustainability (Switzerland), 17(24).

<https://doi.org/10.3390/su172411124>

Zhao, T., Liu, Y., & Ren, Q. (2025). State-led digital governance, digital inclusive finance, and rural poverty. Finance Research Letters, 86.

<https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.108876>

Zheng, J., Zhang, X., & Wang, J. (2025). The Role of

Digital Governance in Fostering County-Level Digital Entrepreneurial Vitality: A Quasi-Experimental Analysis of China's Information Accessibility Pilot.

Sustainability (Switzerland), 17(20).

<https://doi.org/10.3390/su17209096>.



Copyright© 2025. Adam Gamgulu



Google  
Scholar



GARUDA  
GARBA RUJUKAN DIGITAL



Crossref doi